



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan adanya tuntutan mewujudkan pemerintahan yang *good governance* secara transparansi dan akuntabilitas menimbulkan implikasi bagi Pemerintah Pusat maupun bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasinya kepada pihak yang terkait yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Salah satu informasi yang harus disediakan oleh pemerintah adalah informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah, menyatakan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur

pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah. Dengan adanya pedoman tersebut, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance*.

Salah satu elemen laporan keuangan ialah aset. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dinas Pendapatan Daerah sebagai SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) ikut serta dalam menyusun laporan keuangan yang berstruktur untuk menyajikan informasi mengenai entitas pelaporan dan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan aset yang dimiliki oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Keberadaan Aset tetap di suatu instansi pemerintah seharusnya benar-benar milik instansi dan bukan pinjaman atau *lease*.

Aset tetap pemerintahan yang tidak dapat disusutkan adalah tanah. Sementara aset tetap lainnya seperti bangunan, gedung, peralatan, perabotan kantor, serta kendaraan harus disusutkan .

Tanah adalah bagian dari bumi yang dikuasai pemerintahan dan digunakan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan normal pemerintahan. Gedung adalah bangunan-bangunan yang dikuasai oleh pemerintahan yang penggunaannya berkaitan dengan kegiatan normal pemerintahan, contoh: gedung kantor. Kendaraan segala alat transportasi yang dikuasai pemerintahan dan digunakan dalam rangka kegiatan normal pemerintahan, sebagai pengangkut barang atau karyawan. Mesin adalah segenap alat yang digunakan dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengolahan barang yang berkaitan dengan kegiatan normal pemerintahan. Sedangkan alat-alat perkantoran adalah perangkat, perabot dan perkakas perkantoran yang dikuasai pemerintahan untuk digunakan dalam kegiatan normal pemerintahan.

Aset tetap yang dipergunakan oleh instansi pemerintahan perlu adanya perlakuan akuntansi aset tetap. Dalam hal ini pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset tetap sangat perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat mewujudkan kewajaran instansi dalam pencatatan akuntansi. Agar sejalan dengan prinsip akuntansi yang lazim, maka harus sesuai dengan PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu :” Bagaimana Penerapan Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap (PSAP 07) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan terhadap pembuat dan penerima informasi dari laporan keuangan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian terhadap objek yang sama.

3. Dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan tentang laporan keuangan, khususnya tentang aset tetap pada lembaga pemerintahan.

4. Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang berminat dalam masalah akuntansi pemerintahan dan akuntansi aset tetap.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Hang Tuah No. 04.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan terhitung sejak Maret s/d Juni 2018.

3. Jenis Data

a. Data Premier adalah data yang diperoleh dari Pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

4. Metode Pengumpulan Data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi, yaitu penulisan langsung turun kelokasi penelitian untuk mengamati secara langsung mengenai masalah yang diteliti.

b. Interview (Wawancara), yaitu dengan mengemukakan pertanyaan secara lisan mengenai permasalahan yang diteliti kepada responden tentang bagaimana Prosedur Pencatatan Akuntansi Aset Tetap di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Analisis Data

Dalam penggunaan laporan ini penulis melakukan pengolahan terhadap data kemudian disajikan berdasarkan analisis. Secara umum analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu analisis yang tidak disarankan pada perhitungan statistik yang berbentuk kuantitatif (jumlah), akan tetapi dalam bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk Tugas Akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematis tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi tugas akhir adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan disajikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II

: Gambaran Umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang sejarah Kantor dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, meliputi Visi dan Misi, Uraian Tugas, serta Struktur Organisasi.

BAB III

: Tinjauan Teori dan Praktek

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang Pengakuan, Penilaian, Pengukuran dan Pengungkapan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, apakah telah sesuai atau belum dengan (PSAP 07) yang berlaku saat ini

BAB IV

: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperlukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.